

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 3 Oktober 2022

**COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI LANGKAH
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN KARIMUN**

Muhamad Firdaus¹, Michelle Isabella², Nining Setya Ningsih³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: dausfir22233@gmail.com¹, michellelumongdong0513@gmail.com²,
niningsetyaa1812@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi yang membahas tentang Collaborative Governance sebagai salah satu langkah dalam pengembangan pariwisata di kawasan Karimun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan desain baru dalam proses pengembangan pariwisata melalui penggunaan desain kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai satu orang pegawai Dinas Pariwisata dan dua orang pegawai Pulau Moro. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desain baru yaitu collaborative governance untuk pengembangan pariwisata di Karimun masih belum sepenuhnya berhasil diterapkan yaitu dari delapan kriteria keberhasilan kolaborasi. Terdapat tiga kriteria yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam proses pengembangan pariwisata yaitu governance, access to authority, information sharing.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Proses Pengembangan, dan Pariwisata.

Abstract

This research is a study that discusses Collaborative Governance as a step in tourism development in the Karimun area. The purpose of this research is to provide a new design in the tourism development process through the use of collaborative design. This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection was carried out by interviewing one employee of the Tourism Office and two employees of Moro Island. Data analysis is done by reducing data, presenting data, and drawing conclusions The results of this study indicate that the new design, namely collaborative governance for tourism development in Karimun, has not yet been fully implemented, namely from the eight criteria for successful collaboration. There are three criteria that have been applied by the government in the tourism development process, namely governance, access to authority, and information sharing.

Keywords: Collaborative Governance, Development Process, and Tourism.

Pendahuluan

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu

negara(Yakup, 2019). Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Nasional(Saputri, 2022). Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi(Arka & Yasa, 2015). Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa(Pratama, 2022).

Hasil menunjukkan bahwa pariwisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pariwisata(Nizar, 2011). Faktor lain yang berpengaruh terhadap pariwisata di Indonesia yaitu nilai tukar dan inflasi(Sholihah, 2014). Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi, terlebih dapat mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan sektor pariwisata(Aponno, 2020). Pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi internasional.1 .

Hal ini memperkuat pernyataan bahwa sebagai negarakepulauan dan negara maritim Indonesia memiliki kekuatan besar dalam menopang kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Untuk memperkuat kekuatan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia dapat diwujudkan melalui sektorpariwisata2.

Pulau Manda dan Kampung Bahari Desa Jang, Kecamatan Moro menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Karimun.Pulau Manda dikenal sebagai lokasi penangkaran penyu, budidaya rumput laut dan kemping area. Sementara, Kampung Bahari Nusantara sejak dibina oleh Lanal TBK sudah menyediakan berbagai macam wahana air seperti banana boat, sepeda air, menaiki kano dan wahana lainnya. Begitu juga dengan Kampung Bahari Nusantara yang sebelumnya tidak dikenal, kini menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan yang ada di Kabupaten Karimun(Ardiyansyah, 2019). Sebagai salah satu wisata unggulan Pulau Moro masih harus dikembangkan sebaik mungkin untuk menarik minat wisatawan, baik berupa perbaikan infrastruktur berupa dermaga, transportasi, dan juga infrastruktur yang mendukung dilokasi wisata. Hal inilah yang kemudian mengharuskan campur tangan pihak lain selain pemerintah untuk mempercepat laju pengembangan dan pembangunan Pulau Moro sebagai destinasi wisata unggulan. Pihak-pihak

lain yang diharapkan yaitu swasta sebagai investor dan masyarakat sebagai pemilik destinasi. Ketiga elemen inilah yang dibutuhkan kolaborasinya dan memiliki peran masing-masing untuk pengembangan pariwisata. Hal yang dimaksud yaitu collaborative governance merupakan upaya kerjasama yang kolaboratif antar pihak yang intensif dan pihak-pihak yang terlibat memiliki elighthment dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya, dan aktivitas.

Namun hingga sejauh ini ketiga aktor tidak kunjung bersatu lantaran :

1. Karenaketertinggalan masyarakat pulau pisang terhadap perkembangan zaman sehingga mereka belum mampu berpikir secara terbuka karena sudah nyaman dengan gaya hidup yang mereka jalani selama ini. 3
2. Pemerintah yang belum maksimal dalam memberikan penjelasan mengenai potensi pulau Moro kepada masyarakat dan tidak memberikan solusi serta jaminan terhadap ketakutan masyarakat sehingga masyarakat tetap pada zona nyaman mereka.

3. Swasta tidak menjadi faktor penggerak yang dapat menjadi motor agar adanya dorongan atau keinginan dari masyarakat untuk membuka diri terhadap potensi wisata yang daerah mereka miliki.

Collaborative governance dapat menjadi desain baru dan langkah terbaik untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan pengembangan ekowisata bahari di pulau pisang karena pemerintah daerah tidak mempunyai cukup sumber daya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas, kemudian juga pasifnya partisipasi masyarakat pulau pisang (Prihantika, Sulistiowati, & Atika, 2021). Dalam hal ini, permasalahan bukan hanya harus diselesaikan oleh pemerintah daerah tetapi juga harus melibatkan pihak swasta dan juga keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekowisata bahari di pulau Moro.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif (Yuliani, 2018). Hal ini dapat menggunakan tipe deskriptif untuk pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk menjabarkan dan mempelajari mengenai bagaimana hubungan yang terjalin, sikap, kegiatan, serta proses yang berlangsung dan pengaruh yang terjadi pada collaborative governance untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Karimun. Teknik untuk mengumpulkan data yaitu dengan wawancara yang mendalam dan secara langsung dengan narasumber dan studi dokumentasi yang di peroleh peneliti (Nurfirdaus & Risnawati, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Kriteria keberhasilan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Karimun

1. Network Structure

Kriteria pertama yaitu network structure atau pembentukan jaringan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat sejauh ini belum pernah terlaksana. Hal ini dikarenakan pembentukan jaringan yang dilakukan pemerintah baik kepada swasta atau pelaku usaha dan kepada masyarakat hanya bersifat sementara dan tidak tetap yang hanya dilaksanakan apabila ada kegiatan mendesak untuk didiskusikan dan sesuai aturan seperti dilaksanakan satu tahun satu kali. Padahal, dalam network structure seharusnya terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan terus menerus atau sebuah organisasi yang terus berkegiatan. Sejauh ini dalam proses pengembangan pariwisata pemerintahannya melakukan Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) yang diadakan satu tahun sekali.

2. Commitment to a Common Purpose

Setelah dilakukan pembentukan jaringan maka kriteria kedua yaitu setiap elemen harus berkomitmen terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dalam kriteria kedua ini, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat memiliki komitmen yang tinggi dalam proses pengembangan pariwisata.

Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab pada bagian pariwisata telah mengundang elemen-elemen terkait untuk bermusyawarah secara resmi dalam penataan kawasan wisata Labuhan Jukung. Elemen terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas Koperasi, Perdagangan & UMKM, Pedagang Labuhan Jukung, Polsek Pesisir Tengah, Danramil, dan Media. Pengelola dalam hal ini dinas pariwisata adalah pihak pengundang yang mengerti dan berusaha mengedukasi pedagang dan pihak

terkait lainnya untuk pengelolaan labuhan jukung yang lebih baik. Komitmen lain yang sudah dipenuhi oleh pemerintah yaitu dengan mencari investor melalui kegiatan pameran diluar daerah seperti Pekan Raya Lampung yang diselenggarakan pada tahun 2019 dengan mengungkap potensi yang ada di Pesisir Barat seperti kain tapis, repong damar, dan tentunya potensi pariwisata.

3. Trust Among The Participants

Setelah melewati fase berkomitmen terhadap tujuan maka kriteria selanjutnya yaitu rasa saling percaya antar elemen atau stakeholders yang terlibat dan akan terlibat dalam proses kolaborasi. Dalam kriteria ini, sejauh pengembangan pariwisata pemerintah menekankan bahwa rasa saling percaya sudah ada dalam diri masing-masing elemen dimana pemerintah mempercayai keberadaan swasta dan kontribusinya kepada investasi. Begitupun pemerintah untuk membuat swasta mempercayai setiap kebijakan pemerintah salah satunya yaitu dengan penundaan kenaikan PBB apabila swasta tidak menyetujui hal tersebut.

4. Governance

Dalam proses kolaborasi harus ada pemisahan antar elemen yang wajib terlibat dan elemen pendukung kolaborasi. Jika elemen yang harus wajib ada yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat maka elemen tambahan bisa dari bidang akademisi atau media. Proses pengembangan pariwisata yang sudah ada di Pesisir Barat menunjukkan bahwa terdapat elemen lain yang masuk yaitu pihak media yang sudah bekerjasama dengan pemerintah sejak tahun 2016 dan bekerjasama pada bidang promosi pariwisata yang menyeluruh di setiap platform media baik cetak, elektronik, maupun media sosial.

5. Access to Authority

Akses terhadap kekuasaan yang berarti bahwa setiap elemen memiliki hak yang sama terhadap akses kekuasaan yang ada (Prabowo, 2018). Pemerintah memberikan akses seluas mungkin kepada swasta dan masyarakat jika terdapat keluhan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah percaya sudah ada dalam diri masing-masing elemen dimana pemerintah mempercayai keberadaan swasta dan kontribusinya kepada investasi (Hutahayan, 2019). Begitupun pemerintah untuk membuat swasta mempercayai setiap kebijakan pemerintah salah satunya yaitu dengan penundaan kenaikan PBB apabila swasta tidak menyetujui hal tersebut.

6. Governance

Dalam proses kolaborasi harus ada pemisahan antar elemen yang wajib terlibat dan elemen pendukung kolaborasi (Putro, 2014). Jika elemen yang harus wajib ada yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat maka elemen tambahan bisa dari bidang akademisi atau media. Proses pengembangan pariwisata yang sudah ada di Pesisir Barat menunjukkan bahwa terdapat elemen lain yang masuk yaitu pihak media yang sudah bekerjasama dengan pemerintah sejak tahun 2016 dan bekerjasama pada bidang promosi pariwisata yang menyeluruh di setiap platform media baik cetak, elektronik, maupun media sosial.

7. Access to Authority

Akses terhadap kekuasaan yang berarti bahwa setiap elemen memiliki hak yang sama terhadap akses kekuasaan yang ada (Sunarso, SH, & Kn, 2022). Pemerintah memberikan akses seluas mungkin kepada swasta dan masyarakat jika terdapat keluhan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah

Kesimpulan

Collaborative governance adalah alternatif untuk pengembangan web kolaboratif oleh pemerintah, sektor swasta, dan komunitas. Ketiga elemen tersebut masing-masing memiliki peran, dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perizinan, sektor swasta sebagai investor, dan masyarakat sebagai penyedia sumber daya dan pelaksana kebijakan. Beberapa kriteria keberhasilan collaborative governance yang tanpa disadari pemerintah menerapkan dan menegakkannya adalah adanya pemisahan unsur wajib dan unsur tambahan dalam tata kelola atau proses kolaboratif diterapkan oleh pemerintah, hal ini dibuktikan dengan pemerintah Kriteria selanjutnya yang sudah diterapkan pemerintah yaitu access to authority atau akses terhadap kekuasaan juga telah berhasil dalam pengembangan pariwisata dimana pemerintah memberikan akses kepada swasta dan masyarakat dengan membuat website pengaduan melalui <https://www.trepelin.com/pulau-moro-3033> dan masyarakat dapat juga menyampaikan aduan melalui RKJP pekon/desa.

Kemudian kriteria lainnya yaitu information sharing atau pembagian informasi yang jelas, hal ini dibuktikan dengan kemudahan pengaksesan informasi terkait pariwisata meliputi destinasi wisata, hotel, villa dan rumah makan yang bisa diakses hal ini membuat pelaku usaha dan masyarakat saling berhubungan dan berbagi informasi.

BIBLIOGRAFI

- Aponno, Chrestiana. (2020). Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(05), 111–118.
- Ardiyansyah, Ardiyansyah. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Di Desa Benan Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga)*. Universitas Islam Riau.
- Arka, Sudarsana, & Yasa, I. Komang Oka Artana. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 44328.
- Hutahayan, John Fresly. (2019). *Faktor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi dan kinerja pelayanan publik: Studi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Deepublish.
- Nizar, Muhammad Afdi. (2011). *Pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*.
- Nurfirdaus, Nunu, & Risnawati, Risnawati. (2019). Studi tentang pembentukan kebiasaan dan perilaku sosial siswa (Studi Kasus di SDN 1 Windujanten). *Jurnal Lensa Pendas*, 4(1), 36–46.
- Prabowo, Fandy. (2018). Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 125–144.
- Pratama, Elfan Yhuni. (2022). *RANCANG BANGUN POTENSI PARIWISATA BERBASIS APLIKASI ANDROID DI KABUPATEN TANGGAMUS*.
- Prihantika, Ita, Sulistiowati, Rahayu, & Atika, Dewie. (2021). *STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI MELALUI TEKNIK ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (STUDI PADA OBJEK WISATA BAHARI KAB. LAMPUNG SELATAN)*.
- Putro, Pifiek Mochtar Saptono. (2014). *Kolaborasi Governance Dalam Manajemen Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Perparkiran di Kota Surakarta)*. UNS (Sebelas Maret University).

- Saputri, Wahyu Susanti. (2022). *ANALISIS SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016-2020*. STIE INDONESIA BANJARMASIN.
- Sholihah, Mar'atus. (2014). *Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Harga Saham pada Perusahaan Jasa Perhotelan dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sunarso, H. Siswanto, SH, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Yakup, Anggita Permata. (2019). *Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Yuliani, Wiwin. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.